

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan menggunakan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi pustaka maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan telah dirumuskan dan disosialisasikan secara cukup jelas kepada para pelaksana. Hal ini ditunjukkan melalui sosialisasi kebijakan secara berjenjang, ketersediaan pedoman teknis, penerapan SOP pelayanan pendidikan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sehingga arah dan tujuan kebijakan dalam pencegahan serta penanganan anak putus sekolah dapat dipahami dan dijalankan secara terstruktur.
2. Sumber Daya yang mendukung implementasi kebijakan, baik dari aspek sarana prasarana maupun alokasi anggaran daerah, secara umum telah memadai. Dukungan fasilitas pendidikan dan anggaran melalui APBD, BOS, serta program pendukung lainnya memungkinkan pelaksanaan kebijakan berjalan, meskipun pada beberapa sekolah masih diperlukan peningkatan kualitas fasilitas dan dukungan sumber daya tambahan.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana menunjukkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar instansi. Dinas Pendidikan berperan sebagai leading sector dengan dukungan kecamatan dan sekolah sebagai pelaksana teknis, didukung oleh pembentukan tim, pelaksanaan tugas sesuai tupoksi, serta penyusunan laporan kegiatan secara berjenjang untuk menjamin koordinasi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan.
4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Penguatan telah berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Hubungan kerja antara Dinas Pendidikan, kecamatan, dan sekolah terjalin melalui rapat koordinasi, penyampaian instruksi kebijakan, serta komunikasi dua arah, sehingga

pelaksanaan kebijakan penanganan anak putus sekolah dapat dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran.

5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana menunjukkan komitmen dan responsivitas yang cukup tinggi terhadap permasalahan anak putus sekolah. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif, koordinasi berkala, strategi pendampingan berkelanjutan, serta sikap cepat tanggap dalam menangani siswa berisiko melalui pemantauan, *home visit*, dan penyediaan alternatif pendidikan.
6. Kondisi-Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik turut memengaruhi implementasi kebijakan penanganan anak putus sekolah. Faktor ekonomi keluarga masih menjadi tantangan utama, namun adanya koordinasi lintas sektor serta dukungan politik dari pemerintah daerah dan DPRD melalui regulasi, anggaran, dan program pendidikan menjadi faktor penguat dalam menjaga keberlanjutan kebijakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama telah berjalan cukup baik dan terkoordinasi, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek pemerataan sumber daya, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta penguatan intervensi terhadap faktor sosial ekonomi keluarga agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal

Kemudian dalam menghadapi berbagai hambatan, meliputi faktor ekonomi keluarga, mobilitas penduduk tinggi, data yang belum sinkron, keterbatasan kapasitas pemerintah, serta rendahnya motivasi siswa dan orang tua. Kecamatan memiliki keterbatasan kewenangan dan anggaran sehingga pendataan dan pemantauan bergantung pada inisiatif desa, sementara sekolah menghadapi kendala fasilitas, koordinasi dengan orang tua, dan pedoman teknis, sehingga penanganan anak putus sekolah menjadi lebih kompleks dan menantang.

Sehingga strategi mengatasi anak putus sekolah pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara kolaboratif dan adaptif dengan Dinas Pendidikan memimpin melalui pembenahan data, koordinasi lintas sektor, program Sekolah Rakyat, jalur pendidikan alternatif, dan pendampingan, kecamatan berperan dalam koordinasi, pendataan, dan fasilitasi bantuan sosial, serta sekolah melaksanakan intervensi langsung melalui *home visit*, pendampingan intensif, koordinasi dengan orang tua, dan penguatan karakter siswa, sehingga upaya pencegahan dan penanganan anak putus sekolah berjalan efektif dan menyeluruh.

5.2 Rekomendasi

Untuk memperkaya penelitian ini dan melengkapi hasil yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, disarankan untuk terus memperkuat integrasi dan validasi data anak putus sekolah secara berkelanjutan melalui pengembangan sistem pendataan terpadu yang melibatkan sekolah, kecamatan, dan desa/kelurahan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan program pendidikan alternatif perlu terus dilakukan agar penanganan anak putus sekolah dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
2. Bagi pihak kecamatan dan pemerintah desa, disarankan untuk meningkatkan peran aktif dalam pendataan, pemantauan, dan pendampingan anak berisiko putus sekolah, khususnya melalui sinergi dengan sekolah dan pemanfaatan program bantuan sosial. Dukungan anggaran operasional dan kewenangan yang lebih jelas juga diperlukan agar kecamatan dapat menjalankan fungsi koordinatif secara lebih optimal.

3. Bagi sekolah, disarankan untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan orang tua/wali siswa melalui pendekatan persuasif dan berkelanjutan, seperti *home visit* dan pendampingan intensif. Sekolah juga perlu mengembangkan strategi pencegahan yang lebih adaptif, termasuk penguatan layanan bimbingan konseling, pembinaan karakter siswa, serta pemanfaatan jalur pendidikan alternatif bagi siswa yang berpotensi putus sekolah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan variabel atau pendekatan lain yang belum dikaji dalam penelitian ini, seperti analisis efektivitas kebijakan, peran masyarakat, atau faktor budaya dan lingkungan. Selain itu, penggunaan teknik pengumpulan data yang lebih beragam serta periode penelitian yang lebih panjang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan implementasi kebijakan penanganan anak putus sekolah.